

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. LANDASAN TEORI

1. KONSEP PEMBELAJARAN

1.1 Pengertian Pembelajaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembelajaran merujuk pada proses, cara, atau tindakan yang dilakukan untuk menjadikan seseorang atau makhluk hidup memperoleh pengalaman belajar. Dengan demikian, pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu usaha yang dirancang secara sadar dan sistematis melalui pemanfaatan berbagai sumber belajar guna menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya proses belajar pada peserta didik. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Gagne dalam Benny (2011) yang menyatakan bahwa pembelajaran merupakan rangkaian sumber belajar dan prosedur yang dirancang untuk membantu serta memfasilitasi berlangsungnya kegiatan belajar.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pendidik untuk menciptakan dan mendukung terjadinya proses belajar pada peserta didik. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran mencakup kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode maupun model yang sesuai guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil yang ingin dicapai, tetapi juga pada cara mengorganisasikan materi, menyampaikan isi pembelajaran, serta mengelola seluruh proses pembelajaran agar berlangsung secara efektif dan efisien.

Sebelumnya, dalam ruang praktisi pendidikan terdapat paradigma yang menitikberatkan pembelajaran berpusat pada peran guru dalam mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Namun, paradigma pendidikan pada abad ke-21 yang diterapkan pada Kurikulum Merdeka saat ini mampu mengubah dan menjadikan keterampilan pendidik dalam mengaplikasikan model pendekatan pembelajaran *Student-Centered Learning* (SCL). Pendekatan ini juga berperan dalam meningkatkan

motivasi peserta didik dalam menyelesaikan tugas, mempermudah pemahaman materi, serta membantu mereka mencapai hasil belajar yang lebih optimal.

Berbicara mengenai pembelajaran, menurut Sutikno pada bukunya bertajuk *Metode dan Model-Model Pembelajaran* (2019, hlm.11) menjelaskan bahwa secara umum, terdapat dua kelompok faktor yang memengaruhi pelaksanaan pembelajaran, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi yang berasal dari dalam diri guru sebagai pelaksana dan pengelola kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam menjalankan tugasnya, guru dituntut memiliki kesiapan mental, pemahaman yang baik terhadap materi ajar, kesesuaian antara tugas dan tanggung jawab yang diemban, kondisi fisik yang mendukung, serta motivasi dan semangat kerja yang tinggi agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Adapun faktor eksternal adalah kondisi yang timbul atau datang dari luar pribadi guru, antara lain keluarga dan lingkungan pergaulan di masyarakat. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah faktor lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan sekolah.

Sementara itu, faktor eksternal merupakan berbagai kondisi yang berasal dari luar diri guru dan dapat memengaruhi pelaksanaan pembelajaran. Faktor tersebut meliputi lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan sosial, serta lingkungan pendidikan. Selain itu, faktor lingkungan juga mencakup kondisi alam, lingkungan sosial masyarakat, dan lingkungan sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi efektivitas proses pembelajaran.

Menurut Lindgren (1976) dalam (Sutikno:2019, hlm.11), fokus sistem pembelajaran mencakup tiga aspek, yaitu:

1) Peserta didik

Peserta didik merupakan komponen utama dalam kegiatan pembelajaran. Keberadaan mereka menjadi syarat dasar berlangsungnya proses pendidikan, karena tanpa peserta didik kegiatan belajar tidak dapat terlaksana.

2) Proses belajar

Proses belajar mengacu pada berbagai pengalaman, pemahaman, dan perubahan yang diperoleh peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Fokus utama dalam proses ini bukan terletak pada aktivitas guru dalam menyampaikan materi, melainkan

pada bagaimana peserta didik terlibat secara aktif dalam memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap melalui kegiatan belajar.

3) Situasi belajar

Situasi belajar merupakan kondisi atau lingkungan yang mendukung berlangsungnya proses pembelajaran. Situasi ini mencakup berbagai faktor yang dapat memengaruhi kegiatan belajar peserta didik, seperti peran guru, kondisi kelas, sarana pembelajaran, serta interaksi yang terjadi antara seluruh unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran.

a. Unsur- Unsur Sistem Pembelajaran

Secara etimologis, istilah *sistem* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *systema*, yang mengacu pada suatu kesatuan yang tersusun atas berbagai bagian atau unsur yang saling berkaitan dan bekerja secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sutabri (2012, hlm. 6) dalam Kristania dan Apriansyah (2015), sistem diartikan sebagai sekumpulan unsur yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain serta berfungsi secara bersama-sama dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas sejumlah komponen yang memiliki fungsi masing-masing, namun tetap saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam konteks pembelajaran, pendekatan sistem memandang bahwa seluruh unsur pembelajaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap unsur memiliki peran yang saling melengkapi dan mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, efektivitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antarunsur yang terlibat di dalamnya. M. Sobry Sutikno (2013, hlm. 24–27) mengemukakan bahwa sistem pembelajaran terdiri atas beberapa unsur utama, di antaranya sebagai berikut.

1) Tujuan Pembelajaran

Pada hakikatnya, tujuan pembelajaran mengacu pada berbagai kemampuan yang diharapkan berkembang dalam diri peserta didik sebagai hasil dari pengalaman belajar yang diperolehnya. Tujuan tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran sekaligus indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Berdasarkan

Taksonomi Bloom, tujuan pembelajaran diklasifikasikan ke dalam tiga domain utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir yang meliputi aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, domain ini berfokus pada pengembangan pengetahuan serta kemampuan berpikir kritis dan rasional peserta didik dalam memahami materi pembelajaran (Anderson & Krathwohl, 2001).

Di samping ranah kognitif, tujuan pembelajaran juga diarahkan pada pengembangan ranah afektif dan psikomotorik. Ranah afektif berkaitan dengan aspek sikap, sistem nilai, minat, serta perasaan yang dimiliki peserta didik terhadap berbagai objek atau nilai tertentu. Pengembangan ranah ini berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari menerima (*receiving*), merespons (*responding*), menghargai (*valuing*), mengorganisasikan nilai (*organization*), hingga menginternalisasikan nilai tersebut ke dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari (*characterization*). Dengan demikian, ranah afektif berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Sementara itu, ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan melakukan suatu tindakan secara nyata yang meliputi kemampuan meniru, mempraktikkan, hingga melakukan keterampilan secara terampil dan terkoordinasi. Ketiga ranah tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan tujuan pembelajaran agar proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan keterampilan peserta didik (Bloom, Engelhart, Furst, Hill, & Krathwohl, 1956).

2) Materi Pembelajaran

Dalam sistem pembelajaran, materi pembelajaran berperan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh peserta didik (Sutikno, 2019). Penyusunan dan pemilihannya harus didasarkan pada kompetensi yang ingin dikembangkan, mencakup aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selain itu, materi pembelajaran perlu dirancang agar mampu menyesuaikan diri dengan

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Menurut Arikunto (1990), materi pembelajaran merupakan inti dari proses pembelajaran karena menjadi substansi utama yang harus dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk memilih materi yang tidak hanya sesuai dengan kurikulum, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang akan dihadapi peserta didik pada masa depan. Relevansi materi tersebut dapat mendorong tumbuhnya minat serta keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran.

3) Kegiatan Pembelajaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pembelajaran sebagai proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik serta sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Definisi tersebut menegaskan bahwa pembelajaran merupakan aktivitas yang melibatkan berbagai unsur yang saling berhubungan dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, peserta didik, pendidik, dan sumber belajar menjadi komponen utama yang membentuk suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang tersusun atas komponen-komponen yang saling memengaruhi dan berinteraksi secara terintegrasi guna menghasilkan capaian pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Agar hasil pembelajaran dapat tercapai secara optimal, guru perlu memahami bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari aspek biologis, intelektual, maupun psikologis yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Melalui pemahaman terhadap ketiga aspek tersebut, guru dapat menyadari bahwa setiap peserta didik sebenarnya memiliki peluang untuk mencapai prestasi belajar yang baik, meskipun waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya tidak selalu sama (Sutikno, 2019).

4) Metode Pembelajaran

Secara etimologis, istilah metode berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata *meta* yang berarti melalui dan *hodos* yang berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah *thariqah* yang memiliki makna jalan, cara, sistem, atau tata cara dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Sementara itu, secara terminologis, metode dapat dipahami sebagai suatu prosedur atau sistem yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, metode merupakan seperangkat cara yang diterapkan oleh guru untuk menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik selama berlangsungnya proses pembelajaran.

Dalam kegiatan pembelajaran, metode menjadi salah satu komponen yang memiliki peranan penting dalam menunjang keberhasilan proses belajar-mengajar. Penggunaan metode yang tepat dapat membantu guru menyampaikan materi secara lebih efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, metode dipandang sebagai sarana atau alat yang digunakan untuk mengorganisasikan dan menyajikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Sejalan dengan pendapat Hamid (2008, hlm. 3), metode berfungsi sebagai cara yang digunakan untuk menyampaikan bahan ajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

5) Sumber Belajar

Pada tahun 1977, *Association for Educational Communication and Technology* (AECT) memperkenalkan konsep sumber belajar sebagai segala bentuk sumber, baik berupa data, individu, maupun objek tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik dalam proses belajar. Sumber-sumber tersebut dapat digunakan secara mandiri ataupun dikombinasikan sehingga membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif. Definisi ini menunjukkan bahwa sumber belajar tidak terbatas pada bahan ajar semata, melainkan mencakup berbagai unsur yang dapat menunjang proses belajar.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Siregar (2022) menjelaskan bahwa konsep sumber belajar merupakan pengembangan dari istilah media pembelajaran. Dalam pengertian yang lebih luas, media tidak hanya dipahami sebagai alat atau perangkat

fisik yang digunakan dalam pembelajaran, tetapi juga mencakup berbagai sumber yang dapat mendukung proses belajar. Dengan demikian, segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman belajar dapat dikategorikan sebagai sumber belajar.

Sumber belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sumber belajar yang dirancang secara khusus dan sumber belajar yang dimanfaatkan dari lingkungan. Sumber belajar yang dirancang merupakan berbagai sumber yang sengaja dikembangkan sebagai bagian dari sistem pembelajaran untuk menunjang kegiatan belajar yang terarah dan bersifat formal. Sementara itu, sumber belajar yang dimanfaatkan adalah sumber yang pada awalnya tidak secara khusus dibuat untuk kegiatan pembelajaran, tetapi dapat ditemukan di lingkungan sekitar dan digunakan atau diadaptasi untuk mendukung proses belajar peserta didik (Sutikno, 2019: 27)

6) Evaluasi Pembelajaran

Dalam bidang pendidikan, evaluasi diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh, mengolah, dan menafsirkan informasi mengenai hasil belajar peserta didik, pelaksanaan pembelajaran, maupun program pendidikan secara menyeluruh. Melalui evaluasi, pendidik dapat menilai tingkat efektivitas, kualitas, relevansi, serta dampak dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selain itu, evaluasi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan proses pembelajaran sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal (Idrus, 2019).

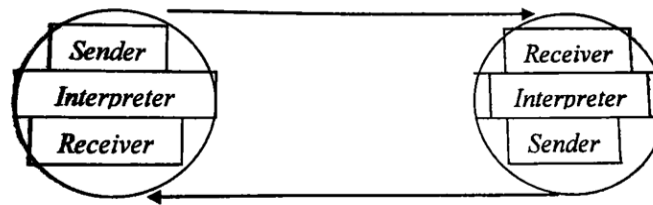
Pada hakikatnya, proses pendidikan merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan pendidik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki setiap peserta didik. Dalam konteks tersebut, evaluasi memiliki peran penting sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Melalui kegiatan evaluasi, guru dapat memperoleh gambaran mengenai capaian belajar peserta didik sekaligus efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan. Oleh karena itu, evaluasi menjadi salah satu komponen penting dalam pembelajaran yang berfungsi sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan di kelas.

7) Peran Guru Dalam Proses Pembelajaran

Menurut Solehah (2025, hlm. 2), guru memiliki berbagai peran penting dalam proses pendidikan, antara lain sebagai *educator*, *motivator*, *fasilitator*, dan *evaluator*. Peran tersebut kemudian berkembang dalam konsep EMASLIMDEF (*Educator*, *Manager*, *Administrator*, *Supervisor*, *Leader*, *Innovator*, *Motivator*, *Dinamisator*, *Evaluator*, dan *Fasilitator*) yang menggambarkan tugas guru secara lebih komprehensif. Dalam konsep ini, guru tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai pemimpin, pengelola, pengawas, penggerak inovasi, serta pembimbing yang mendukung perkembangan peserta didik. Kompleksitas peran tersebut semakin meningkat seiring dengan perkembangan pendidikan abad ke-21 yang menuntut guru untuk mampu menjadi agen perubahan dalam bidang sosial maupun intelektual. Dengan demikian, peran guru dapat dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu peran pedagogis, manajerial, dan transformasional.

Dalam proses pembelajaran di dalam kelas, umumnya terdapat 3 poin utama sebagai unsur kehadiran pembelajaran, di antaranya (1) guru, (2) pesan atau informasi, dan (3) peserta didik. Untuk menerapkan proses pembelajaran yang baik, tentu diperlukan pola komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik, sehingga terpadunya dua kegiatan, yakni kegiatan mendidik dan kegiatan belajar, yang berdaya guna dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sejalan dengan hal itu, Sutikno (2019: 5) juga menjelaskan bahwa kegagalan dalam proses pembelajaran sering dijumpai karena lemahnya komunikasi, sehingga guru perlu mengembangkan pola komunikasi yang baik dan efektif.

Komunikasi yang baik merupakan komunikasi yang transaksional atau ada timbal balik seperti yang terlihat dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.1 Komunikasi Transaksional

Sumber: (Sutikno, 2019)

Komunikasi transaksional menurut Barnlund merupakan proses komunikasi yang menekankan terjadinya pertukaran pesan secara terus-menerus antara pengirim dan penerima dalam suatu interaksi. Dalam proses tersebut, individu tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan, tetapi juga secara bersamaan menerima dan menafsirkan pesan melalui berbagai bentuk komunikasi, termasuk bahasa nonverbal seperti ekspresi wajah. Dalam konteks pendidikan, komunikasi transaksional antara pengajar sebagai komunikator dan siswa sebagai komunikan menjadi sangat penting agar proses pertukaran pesan dapat berlangsung secara efektif dan dapat dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak (Manuahe *et al.*, 2024).

2. METODE PEMBELAJARAN

2.1 Pengertian Metode Pembelajaran

Di era *Society 5.0* yang terus-menerus tergerus oleh digitalisasi, pendidikan tentunya akan memegang peran krusial dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karenanya, diperlukan satu aktor utama di dalamnya, yakni guru profesional yang mampu mengelola pembelajaran dengan metode-metode yang tepat dalam memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami muatan materi pada pelajaran sehingga nantinya mampu menghasilkan nilai akhir belajar yang lebih baik (Sobri, 2019: 29).

Secara konseptual, gagasan mengenai pembaruan metode pembelajaran telah diperkenalkan oleh filsuf pendidikan, John Dewey, pada akhir abad ke-19. Melalui karyanya yang berjudul *My Pedagogic Creed* (1897), Dewey menyatakan bahwa

persoalan metode pada dasarnya berkaitan dengan perkembangan kemampuan dan minat peserta didik. Pandangan tersebut menegaskan bahwa pemilihan metode pembelajaran yang tepat dapat membantu mengoptimalkan potensi serta meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam mengikuti proses belajar. Oleh karena itu, metode pembelajaran memiliki peran penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan bermakna.

Secara etimologis, istilah *metode* berasal dari bahasa Latin yang tersusun atas kata *meta* yang berarti melalui dan *hodos* yang berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah *thariqah* yang mengandung makna jalan, cara, sistem, atau tata aturan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, metode pembelajaran dapat dipahami sebagai serangkaian cara atau prosedur yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai kepada peserta didik selama berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan demikian, metode pembelajaran menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.

Pemilihan metode pembelajaran yang tepat dapat berperan dalam meningkatkan motivasi serta ketertarikan peserta didik terhadap proses belajar. Selain itu, penggunaan metode yang sesuai juga membantu peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Oleh karena itu, dalam menentukan metode pembelajaran, pendidik perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta situasi dan konteks pembelajaran yang berlangsung (Hasibuan *et al.*, 2024).

Secara umum, metode pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu metode konvensional dan metode inovatif. Metode konvensional merupakan pendekatan pembelajaran yang telah lama digunakan dan menjadi praktik yang umum diterapkan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, metode ini sering disebut sebagai metode tradisional. Sementara itu, metode inovatif merupakan pendekatan pembelajaran yang muncul sebagai hasil perkembangan dan pembaruan dalam dunia pendidikan. Metode ini belum sepenuhnya diterapkan secara luas karena umumnya memerlukan dukungan sarana dan prasarana tertentu. Beberapa contoh metode inovatif antara lain pembelajaran berbasis modul, pengajaran

berprogram, pembelajaran unit, serta pembelajaran yang memanfaatkan perangkat atau program teknologi. Penerapan metode tersebut biasanya ditemukan pada lembaga pendidikan yang memiliki fasilitas pendukung yang memadai.

2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Pembelajaran

Berbicara mengenai pembelajaran, khususnya metode, penulis menyimpulkan bahwa pada prinsipnya tidak ada satu pun metode pembelajaran yang dapat dipandang sempurna dan cocok untuk semua pokok bahasan dalam setiap bidang studi. Mengapa demikian? Sebab setiap metode pasti memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, dan karenanya guru tidak boleh sembarangan memilih serta menggunakan metode.

Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikono (2007) dalam *Buku Metode & Model-Model Pembelajaran* mengurai beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode antara lain:

1) Tujuan yang Hendak Dicapai

Menurut KBBI, tujuan dapat dimaknai sebagai sesuatu yang diharapkan tercapai setelah melakukan serangkaian proses kegiatan. Oleh karena itu, tujuan menjadi acuan utama dalam berjalannya proses pembelajaran. Sehingga semakin jelas apa tujuan pencapaiannya, akan semakin mudah mengklasifikasikan metode untuk mencapainya (Sutikno: 2019).

2) Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran merupakan komponen penting dalam kegiatan belajar mengajar karena berisi pokok bahasan atau isi pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Tanpa adanya materi, proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena tidak ada informasi atau pengetahuan yang dapat dipelajari oleh siswa. Selain berfungsi sebagai bahan yang diajarkan oleh guru, materi pelajaran juga menjadi salah satu sumber belajar bagi peserta didik karena di dalamnya memuat pesan, informasi, serta pengetahuan yang bertujuan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran (Pane & Dasopang, 2017).

3) Peserta Didik

Peserta didik merupakan individu yang memiliki berbagai potensi yang perlu dikembangkan melalui proses pendidikan, baik yang berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat (Subianto, 2013; Amin, 2018; Baharun & Zulfaizah, 2018). Potensi tersebut mencakup aspek fisik maupun psikologis yang memerlukan pembinaan secara terarah agar dapat berkembang secara optimal. Dalam kedudukannya sebagai peserta didik, individu juga dituntut untuk memahami serta melaksanakan hak dan kewajibannya. Hak peserta didik merujuk pada segala sesuatu yang berhak diperoleh selama mengikuti proses pendidikan, sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagai bagian dari proses pembelajaran.

2.3 Metode Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Wahab (2011: 358), dalam pendekatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) seyogianya harus selaras dengan nilai tuju dari keilmuan Pkn tersendiri, yakni berorientasi membangun peserta didik sebagai warga negara yang baik dan cerdas (*Civic Intelligence*) dengan dimensi intelektual, emosional, spiritual, bertanggung jawab (*Civic Responsibility*), dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam penyusunan strategi pembelajaran yang baik, tentunya dimulai dengan kemampuan guru dalam melakukan proses pengumpulan atau analisis data dan informasi mengenai berbagai faktor yang berpengaruh nantinya terhadap proses pembelajaran peserta didik di dalam kelas. Menurut Laurie Brady (1990) yang dikutip dari bukunya Wahab (2011: 341) menegaskan bahwa kemampuan analisis data sangat diperlukan agar nantinya mampu menentukan efektivitas penerapan kurikulum yang sesuai dengan kondisi iklim sekolah maupun hambatan peserta didik dalam belajar baik secara internal maupun eksternal.

Demikian Skilbeck (1994) membagi faktor tersebut, diantaranya:

- 1) **Faktor-faktor eksternal** mencakup berbagai kondisi yang berasal dari lingkungan luar dan dapat memengaruhi proses maupun hasil pendidikan.

Faktor-faktor tersebut meliputi perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap dunia pendidikan, berbagai tuntutan dan hambatan dalam sistem pendidikan, perkembangan materi pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman, serta peran dan dukungan guru dalam mendukung keberhasilan proses belajar peserta didik.

- 2) **Faktor-faktor Internal** yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam lingkungan pendidikan dan secara langsung memengaruhi pelaksanaan pembelajaran. Faktor tersebut meliputi karakteristik peserta didik, seperti bakat, kemampuan, serta kebutuhan belajarnya. Selain itu, faktor internal juga mencakup aspek yang berkaitan dengan guru, antara lain nilai-nilai yang dianut, sikap, keterampilan mengajar, tingkat pengetahuan, pengalaman, serta kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki dalam menjalankan perannya sebagai pendidik. Faktor lainnya meliputi budaya dan iklim sekolah, struktur organisasi yang berlaku, ketersediaan sumber serta bahan pembelajaran, dan berbagai kelemahan atau permasalahan yang ditemukan dalam kurikulum yang sedang diterapkan.

Kendati demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua faktor tersebut merupakan keterkaitan satu sama lain yang tak bisa dipisahkan. Dua faktor ini saling mengisi sehingga saling berpengaruh dan saling menentukan keberhasilan guru dalam mengajar dan peserta didik belajar (Wahab, 2011: 343). Dengan kata lain, penulis menyimpulkan bahwa kehadiran peran guru sangat strategis dalam pembelajaran, tepatnya dalam meraih keberhasilan selama proses pembelajaran berlangsung, sebab dibutuhkan kemampuan guru dalam mempertimbangkan, merancang, dan mendesain faktor-faktor tersebut dalam suatu model pembelajaran.

3. DEBAT

3.1 Pengertian Debat

Menurut KBBI, debat adalah aktivitas pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing setiap anggota tim, sedangkan menurut Ensiklopedia, debat ialah

kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih yang mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan berdasarkan data dan argumentasi yang logis.

Demikian penulis menyimpulkan bahwa debat merupakan seni berkomunikasi dengan cara beradu argumentasi untuk menyampaikan ide secara logis dan bukti-bukti pendukung dari masing-masing pihak yang berdebat. Pada dasarnya, kegiatan debat pada pembelajaran juga melatih keberanian peserta didik dalam mengekspresikan pendapat di ruang kelas dan melatih kemampuan analitis kritis dalam setiap mosi yang disampaikan, untuk meningkatkan daya pengetahuan yang berwawasan luas (Suherwin, 2020, hal. 14).

Dikutip dari bukunya M. Zein Iqbal Suherwin dan Herly Dayanti (2020: 14) bertajuk *Pembelajaran Debat*, Tarigan (1984) membagi macam-macam debat sebagai berikut:

1) Debat Parlementer (*Assembly or Parliamentary Debating*)

Debat parlementer bertujuan untuk memberi dan menambah dukungan bagi undang-undang tertentu dan semua anggota memiliki ruang yang sama dalam menyatakan pandangan dan pendapatnya dalam mendukung atau menentang usulan setelah mendapatkan izin dari majelis atau pimpinan. Umumnya, debat parlementer biasa kita temui dalam kelompok legislatif.

2) Debat Formal

Debat formal biasa ditemui di ruang pendidikan dan merupakan debat yang bertujuan memberikan kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan kepada para pendengar sejumlah argumen yang menunjang atau membantah suatu usul.

3.2 Etika Dalam Debat

Menurut Plato, ia berpendapat bahwa jiwa manusia dibagi menjadi tiga bagian, yakni (1) *Rational Logical*, artinya mencari kebenaran dapat dipengaruhi oleh fakta dan argument; (2) *Spirited Emotional*, artinya bagaimana bagian dari emosi dan perasaan manusia dapat memengaruhi tindakan; (3) Nafsu, artinya bagaimana manusia

memiliki insting dalam melindungi diri dari ancaman bahaya. Dalam arti, di mana pun manusia berada, perlu diseimbangkan dengan nilai etika dan moral.

Begitu pun dalam debat, Suherwin (2020: 49) menyebutkan bahwa sebagai pendebat tidak boleh memiliki motivasi berdebat hanya karena dasar kontroversial atau popularitas dari pihak tertentu, sebab sejatinya etika tertinggi dalam berdebat adalah kejujuran dan idealisme. Artinya, tidak hanya menyangkut kepentingan gagasan individu, tetapi juga kebermanfaatan bagi nilai kemanusiaan.

3.3 Teknik-Teknik Pada Debat

Dari pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan debat, terdapat berbagai teknik yang digunakan untuk menyampaikan gagasan secara sistematis, logis, dan persuasif. Teknik-teknik ini menjadi bagian penting dalam membangun argumentasi yang kuat sekaligus menanggapi pandangan pihak lain secara kritis dan terstruktur. Melalui penggunaan teknik debat yang tepat, penyampaian pendapat tidak hanya berfungsi sebagai sarana mempertahankan posisi, tetapi juga sebagai upaya memperjelas sudut pandang, memperkuat alasan, serta menunjukkan kemampuan berpikir analitis dalam suatu diskusi yang bersifat argumentatif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai teknik dalam debat menjadi hal yang penting untuk mendukung proses penyampaian ide secara efektif.

Demikian, Suherwin (2020: 71) berpendapat bahwa terdapat beberapa teknik dalam berdebat, yaitu:

1). Teknik *Trapping*

Teknik *trapping* atau teknik jebakan merupakan strategi debat yang dilakukan dengan mengarahkan lawan debat pada suatu topik atau titik argumentasi tertentu yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam teknik ini, pendebat berupaya membawa lawan ke dalam area pembahasan yang memiliki kelemahan sehingga lebih mudah untuk dipatahkan melalui argumen yang telah dirancang.

2). Teknik *Switching*

Teknik *switching* atau pertukaran posisi adalah strategi debat yang memanfaatkan argumen lawan sebagai dasar untuk memperkuat argumen sendiri. Melalui teknik ini,

pendebat mengembalikan kritik atau pernyataan lawan sehingga lawan secara tidak langsung harus menjawab atau mempertanggungjawabkan argumennya sendiri. Akibatnya, posisi argumentasi tampak berbalik dan pendebat tidak perlu memberikan sanggahan secara langsung.

3). Teknik *Contradicting*

Teknik *contradicting* merupakan strategi yang digunakan untuk menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau kontradiksi dalam argumen lawan. Pendebat berusaha mengidentifikasi kelemahan logis serta inkonsistensi dalam pernyataan lawan sehingga kredibilitas argumen yang disampaikan dapat dipertanyakan.

4). Teknik *Balancing*

Teknik *balancing* atau teknik penyeimbangan dilakukan dengan memberikan tanggapan yang setara terhadap kritik yang diajukan lawan. Strategi ini umumnya digunakan ketika pendebat memiliki keterbatasan dalam memberikan pembelaan secara langsung, sehingga ia berupaya menempatkan lawan pada kondisi atau posisi yang serupa dengan dirinya untuk menciptakan keseimbangan argumentasi.

5). Teknik *Judgement*

Teknik *judgement* merupakan strategi debat yang bertujuan menempatkan lawan pada posisi yang dianggap keliru atau bertanggung jawab atas suatu persoalan. Dengan menggunakan teknik ini, pendebat mendorong lawan untuk terus melakukan pembelaan terhadap argumennya sendiri, sehingga kesempatan lawan untuk melakukan serangan balik menjadi lebih terbatas.

3.4 Keefektifan Metode Debat Dalam Pembelajaran

Secara umum, debat adalah adu pendapat atau argumen. Adanya pendapat yang dilakukan oleh dua pihak, baik perseorangan maupun kelompok, yaitu pro dan kontra. Pada dasarnya, debat menuntut peserta didik agar terlebih dahulu mencari informasi sebanyak mungkin, sehingga dalam prosesnya peserta didik dapat mempertahankan argumen atau pendapatnya serta dapat memberikan alasan yang bersifat realistis dan mengandung kebenaran.

Metode debat aktif pertama kali diperkenalkan oleh Melvin L. Silberman melalui pembelajaran aktif (*active learning*). Guru Besar Kajian Psikologi Pendidikan di Temple University tersebut menyatakan bahwa metode debat aktif ini mampu mendorong peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya melalui perdebatan antarkelompok diskusi yang disatukan dalam sebuah kelas. Metode ini juga melatih kemampuan kognitif, sebab peserta didik dalam pembelajaran metode debat pastinya akan mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan pendapatnya sendiri (Suherwin: 2020, hal. 93).

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Hidayatullah (2021) juga menyebutkan bahwa debat aktif merupakan bentuk retorika modern yang melibatkan dua pihak atau lebih yang saling menyampaikan argumen untuk memengaruhi sikap dan pendapat pihak lain melalui komunikasi yang bersifat argumentatif. Penulis juga menilai bahwa penggunaan metode debat aktif dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila sekaligus bisa mempraktikkan sikap demokratis dan saling menghormati terhadap perbedaan pendapat yang disampaikan.

4. KEMAMPUAN ANALITIS

4.1 Pengertian Berpikir Analitis

Menurut Senangsa (2023, hlm. 20-23), berpikir analitis merupakan sebuah kemampuan dalam menganalisis, mengurai dan memahami suatu masalah atau situasi secara terstruktur, logis, kritis dan sistematis. Sebab berpikir analitis juga turut melibatkan kemampuan dalam melihat hubungan antara berbagai aspek suatu hal dan mampu mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang ada.

Kemajuan dan perkembangan zaman amat mempengaruhi perkembangan pendidikan, dan abad ke-21 adalah era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Kondisi ini menuntut individu untuk memiliki berbagai keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman. Menurut *Partnership for 21st Century Learning*, kompetensi yang perlu dimiliki pada abad ke-21 dikenal dengan istilah 4C. Kompetensi tersebut mencakup kemampuan berpikir kreatif (*creative thinking*), kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah (*critical*

thinking and problem solving), kemampuan berkomunikasi secara efektif (*communication*), serta kemampuan bekerja sama dengan orang lain (*collaboration*). Keempat kompetensi tersebut menjadi bekal penting bagi individu dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi di era modern.

4.2 Proses Berpikir Analitis

Maqruf, Sudirman, dan Muksar (2023) menyatakan bahwa kemampuan memecahkan masalah berkaitan erat dengan kemampuan berpikir analitis siswa. Proses berpikir analitis merupakan proses berpikir yang ditandai dengan kemampuan memilah informasi penting dari suatu materi serta memahami hubungan antarbagian materi tersebut dengan keseluruhan konsep.

Dalam bukunya Matthew Senangsa bertajuk *Terampil Berpikir Analitis dan Kritis*, terdapat beberapa tahapan dalam proses berpikir analitis diantaranya:

1) Mengumpulkan Informasi

Tahap awal dalam proses berpikir analitis adalah mengumpulkan informasi dan data yang relevan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan, dokumen, atau wawancara dengan sumber yang kompeten.

2) Menganalisis Informasi

Setelah mengumpulkan informasi, tahap selanjutnya adalah menganalisis informasi tersebut secara kritis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan dan menghubungkan satu faktor dengan faktor lainnya. Selain itu, analisis dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah yang dihadapi.

3) Membuat Hipotesis

Setelah proses analisis dilakukan, langkah berikutnya adalah menyusun hipotesis atau dugaan sementara mengenai kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. Penyusunan hipotesis harus didasarkan pada hasil pengolahan data serta informasi yang telah diperoleh dan dianalisis sebelumnya. Dengan demikian, hipotesis tersebut dapat digunakan sebagai landasan dalam menentukan serta mengambil keputusan yang lebih tepat dan rasional.

4) Menguji Hipotesis

Tahap selanjutnya adalah menguji hipotesis yang telah dibuat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen atau pengamatan untuk melihat apakah hipotesis yang dibuat dapat diuji kebenarannya. Jika hipotesis tidak terbukti benar, maka perlu untuk kembali ke tahap analisis dan membuat hipotesis yang lebih akurat.

5) Mengambil Keputusan

Setelah melalui tahapan-tahapan di atas, tahap terakhir dalam proses berpikir analitis adalah mengambil keputusan. Keputusan harus didasarkan pada data dan informasi yang telah dianalisis dan diuji sebelumnya. Keputusan ini harus juga mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dan meminimalkan risiko atau konsekuensi yang mungkin terjadi.

4.3 Strategi Berpikir Analitis

Berpikir analitis merupakan kemampuan kognitif yang melibatkan proses menguraikan suatu permasalahan atau gagasan ke dalam bagian-bagian yang lebih spesifik untuk dianalisis secara mendalam. Setiap bagian kemudian dikaji guna memahami keterkaitan dan hubungan yang terbentuk di antara unsur-unsur tersebut. Selain itu, kemampuan berpikir analitis juga mencakup upaya menyusun kembali berbagai unsur yang telah dianalisis sehingga menghasilkan pemahaman atau solusi yang lebih komprehensif. Dengan demikian, berpikir analitis dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengidentifikasi, mengelompokkan, dan membedakan berbagai aspek suatu permasalahan, serta menentukan hubungan logis yang terdapat di dalamnya.

Untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis, seseorang tentunya perlu mempraktikkan beberapa strategi teknik yang efektif. Oleh karenanya, Senangsa (2023: 33) membagi menjadi lima point utama diantaranya, (1) Belajar untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi dengan kritis yakni melibatkan kemampuan memilah informasi dan membedakan antara fakta dan opini, (2) Mempraktikkan kemampuan untuk memecahkan masalah secara sistematis yakni kemampuan dalam menganalisa hasil dan mampu membuat rencana tindakan yang efektif, (3) Kemampuan dalam berpikir kritis yakni kemampuan dalam menentang

argumen dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang cermat, (4) Kemampuan berkomunikasi secara efektif yakni kemampuan dalam menyampaikan ide dengan jelas dan persuasif.



Gambar 2.2 Pembagian Otak Manusia

Sumber: *fr.pinterest.com*

Dalam perspektif anatomis, tentunya peran otak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Setiap individu mengalami perkembangan sesuai dengan karakteristik biologis yang dimilikinya, termasuk perkembangan fungsi dan kapasitas otak. Dalam perspektif filsafat pendidikan, tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang utuh atau *insan kamil*, yaitu individu yang mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, baik potensi fisik, spiritual, maupun intelektual. Berdasarkan pandangan tersebut, pendidikan dapat dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perkembangan manusia dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupannya.

Sejalan dengan pendapat Amin (2018, hlm. 38–40), pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia sehingga individu mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan hakikat kemanusiaannya. Melalui pendidikan, setiap individu diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terus meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan berbagai potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, pendidikan berperan penting dalam mendukung pengembangan kapasitas manusia agar mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Otak manusia sendiri terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu belahan kiri dan kanan yang biasa disebut otak kiri dan otak kanan. Menurut Nurjanah (2010: 89), otak

kiri berperan dalam kemampuan verbal dan numerik, seperti berbicara, membaca, menulis, serta berhitung. Cara berpikirnya bersifat logis, sistematis, dan analitis, serta berkaitan dengan memori jangka pendek. Sebaliknya, otak kanan berkaitan dengan aspek seperti irama, musik, imajinasi, emosi, warna, gambar, dan diagram. Pola berpikirnya cenderung kreatif, tidak terstruktur, dan menyeluruh, serta berhubungan dengan memori jangka panjang (Nurjanah, 2010:89).

Dengan demikian, kemampuan analitis termasuk pada bagian otak kiri manusia dan penting bagi setiap individu untuk mengembangkannya tidak hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam dunia akademik, bisnis, atau pekerjaan, terutama dalam era *Society 5*. Kemampuan analitis juga bisa dikembangkan dari dukungannya terhadap kemauan berlatih yang nantinya kemampuan tersebut bisa membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana, menyelesaikan masalah, dan memperkuat kemampuan mengevaluasi dan menyeleksi informasi (Senangsa, 2023:7).

5. PENDIDIKAN PANCASILA

5.1 Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Sepanjang sejarah pendidikan, istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) telah beberapa kali mengalami perubahan. Dahulu PPKn dikenal dengan pelajaran *Civics*, kemudian Pendidikan Moral Pancasila, berkembang menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hingga sampai pada Pendidikan Pancasila. “Pada tahun 1973 melalui Tap. MPR No. IV/ MPR/ 1973 bidang studi ini diinstruksikan untuk masuk dalam kurikulum sekolah dari sekolah taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta” (Daryono, dkk., 2008, hlm. 1). Hal tersebut dikarenakan ilmu PPKn dalam kurikulum sekolah tidak hanya sebuah mata pelajaran aplikatif secara teori, namun juga dalam penerapan di kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik (*good citizenship*).

John Scarles (1958: 247) dalam tulisannya “*Civics in The Curriculum*” menyebutkan bahwa:

“Civics primarily focuses on the study of democratic governance, both in its theoretical foundations and practical applications. A broader perspective is

reflected in citizenship education, which emphasizes the active participation and engagement of citizens in social and public affairs. This approach highlights the importance of preparing individuals to contribute responsibly to society and democratic processes. In many educational settings, civics and citizenship education are taught as interconnected subjects, although they may also be presented separately depending on the objectives of the curriculum."

Artinya, *Civics* (Pendidikan Kewarganegaraan) pada dasarnya membahas mengenai bagaimana sistem dan nilai dari demokrasi dijalankan baik secara teori ataupun praktiknya. Sehingga tidak hanya persoalan materi demokrasi, tetapi juga bagaimana demokrasi itu sendiri bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Cakupan luasnya, PPKn juga menekankan peran aktif masyarakat: bagaimana warga negara bisa turut terlibat dalam kehidupan sosial seperti dalam kegiatan masyarakat, politik, ataupun pengambilan kebijakan dan keputusan publik.

Menurut Wahab dan Sapriya (2011, hlm. 15), konsep *Civics* yang kemudian dikenal sebagai Pendidikan Kewarganegaraan telah menjadi bagian dari kurikulum sekolah di Indonesia sejak tahun 1968. Mata pelajaran ini dirancang untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik melalui pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dan negara. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tidak hanya berorientasi pada pengembangan aspek kognitif, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter dan kepribadian warga negara. Melalui proses pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mampu menginternalisasi serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

5.2 Pendidikan Kewarganegaraan dalam *Social Studies*

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bidang kajian yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan. Secara filsafat keilmuan, menurut Chressshore (1886), PKn memiliki objek kajian ilmu pokok, yaitu ilmu politik, khususnya konsep demokrasi politik (*political democracy*) dalam mengatur mengenai nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Hasni

et al. (2020: 86) menyebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan *dalam social studies* merupakan bentuk keberlanjutan yang mewariskan unsur kewarganegaraan dengan menanamkan komitmen dasar kepada peserta didik mengenai nilai-nilai kemasyarakatan, yaitu nilai pengetahuan, tingkah laku, dan nilai-nilai kebudayaan.

engan memperoleh pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan secara tepat dalam pembelajaran *social studies*, peserta didik diharapkan mampu berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki kecerdasan intelektual dan karakter yang kuat. Selain itu, mereka diharapkan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat serta menjadi agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Pendidikan kewarganegaraan juga berperan dalam mendorong terjadinya *transfer of learning*, *transfer of values*, dan *transfer of principles*, sehingga nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip masyarakat madani dapat dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa misi utama dari *Social Studies* ialah untuk membantu peserta didik belajar tentang dunia sosial. Sebagaimana Somantri (2001) nyatakan, diharapkan peserta didik mampu mengenali di mana dirinya berada dan bagaimana caranya peserta didik belajar dalam memecahkan realitas sosial ke dalam tiga aspek, yakni secara filosofis, konseptual, dan operasional melalui dikembangkannya nilai pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*) yang diperlukan untuk membentuk manusia yang berkarakter cerdas dan baik (*smart and good citizenship*).

Menurut Michaelis (1980) dalam Wahab & Sapriya (2011, hlm. 94-96), *Social Studies* didefinisikan dengan cara membedakannya menjadi lima tradisi yang masing-masingnya memiliki akar filosofis tersendiri. Kelima definisi tersebut adalah: (1) *Social Studies as citizenship transmission*; (2) *Social Studies as social science education*; (3) *Social Studies as reflective thinking*; (4) *Social Studies as social criticism*; (5) *Social Studies as personal development of the individual*.

Kelima tradisi ini lebih lanjut didefinisikan sebagai berikut:

1	<i>Social Studies as citizenship transmission</i>	Menekankan bahwa social studies berfungsi untuk mentransmisikan nilai-nilai dasar sejarah dan budaya sebab kewarganegaraan yang baik terbentuk dari pemahaman terhadap warisan budaya.
2	<i>Social Studies as social science education</i>	Definisi tersebut banyak mendapat dukungan dari kalangan yang menganut pandangan realisme dan positivisme. Kelompok ini berpendapat bahwa substansi maupun metode pembelajaran Ilmu Sosial seharusnya bersumber dari berbagai disiplin ilmu sosial. Dalam perspektif tersebut, warga negara yang efektif adalah individu yang memiliki pemahaman terhadap konsep-konsep dasar ilmu sosial serta mampu memanfaatkan metode dan pendekatan dari ilmu-ilmu sosial untuk menganalisis serta menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat.

3	<i>Social Studies as reflective thinking</i>	Definisi ini ditekankan oleh para pragmatis yang percaya bahwa tujuan utama Studi Sosial adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan. Warga negara yang efektif dapat menggunakan model dan proses berpikir serta pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan isu.
4	<i>Social Studies as social criticism</i>	Inilah penekanan dari kaum rekonstruksionis yang percaya bahwa tujuan utama Studi Sosial adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memperbaiki masyarakat. Warga negara yang bertanggung jawab dapat melakukan analisis kritis terhadap isu dan masalah terkini serta mengambil tindakan yang tepat.
5	<i>Social Studies as personal development of the individual</i>	Hal ini ditekankan oleh para pendukung progresivisme dan eksistensialisme yang percaya bahwa program tersebut harus

		berpusat pada siswa dan harus mengembangkan seluruh potensi anak—secara sosial, emosional, intelektual, dan fisik. Pemahaman diri dan pengarahannya sendiri sangat penting untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab.
--	--	---

Tabel 2.1 *Five Definition of Social Studies*

Sumber: Michaelis (1980) dalam Wahab & Sapriya (2011, hlm. 94–96)

Dari perspektif epistemologis, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berkembang melalui tradisi *Civic Education* dan *Citizenship Education* yang disesuaikan dengan tujuan nasional masing-masing negara. PKn merupakan salah satu bidang kajian yang berasal dari lima tradisi utama dalam *social studies*, khususnya tradisi *citizenship transmission*. Oleh karena itu, PKn memiliki karakter yang bersifat multidimensional karena mencakup berbagai aspek keilmuan, program kurikuler, serta aktivitas sosial dan budaya. Menurut Winataputra (2001), karakter multidimensional tersebut memungkinkan PKn dipahami dari berbagai sudut pandang, seperti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan karakter kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, hingga pendidikan demokrasi. Perbedaan perspektif tersebut bergantung pada objek kajian, pendekatan metodologis yang digunakan, serta tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut (Wahab & Sapriya, 2011, hlm. 97–98).

5.3 Objek Kajian Pendidikan Kewarganegaraan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa keilmuan PKn bersifat multidimensional dan mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang mengungkapkan bahwa:

“Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diharapkan mampu menjadi sarana pendidikan yang efektif dalam membentuk peserta didik agar memiliki kesadaran kebangsaan serta rasa cinta terhadap tanah air. Melalui pembelajaran PPKn, peserta didik diarahkan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta prinsip-prinsip yang mendasari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa PPKn merupakan mata pelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter kebangsaan peserta didik melalui penguatan nilai-nilai nasionalisme dan kecintaan terhadap negara. Selain itu, menurut Somantri (2001) dalam Wahab dan Sapriya (2011, hlm. 316), kajian utama *Civics* atau Pendidikan Kewarganegaraan berfokus pada warga negara dalam berbagai aspek kehidupannya, termasuk hubungan dengan organisasi kemasyarakatan, bidang sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, serta kehidupan bernegara. Dengan demikian, ruang lingkup PPKn tidak hanya membahas hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga mencakup berbagai dimensi kehidupan yang berkaitan dengan peran individu dalam masyarakat dan negara.

Meskipun demikian, perilaku warga negara pada dasarnya dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan lingkungan tempat mereka hidup. Oleh karena itu, kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) tidak dapat dilepaskan dari kondisi dan realitas kehidupan masyarakat yang menjadi ruang interaksi warga negara. Perilaku warga negara yang dimaksud merujuk pada tindakan atau respons individu yang muncul dalam situasi dan kondisi tertentu sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya.

Secara filosofis, objek kajian PPKn dalam konteks Indonesia meliputi beberapa aspek utama, yaitu Nusantara Indonesia sebagai ruang geografis dan geopolitik bangsa; manusia sebagai pribadi yang memiliki dimensi individual maupun sosial; kekayaan nasional yang mencakup sumber daya alam dan budaya; kesadaran keindonesiaan sebagai bentuk pengakuan terhadap identitas bangsa dan negara; serta jati diri bangsa Indonesia yang menjadi ciri khas dan landasan karakter nasional. Kelima aspek

tersebut menjadi fondasi konseptual dalam memahami hakikat kewarganegaraan dan kehidupan berbangsa di Indonesia (Wahab & Sapriya, 2011, hlm. 318–320).

Landasan Ontologi PKn	Landasan Pokok	Landasan Filosofi	Landasan Normatif	Landasan Psikologis
Nusantara Indonesia	Negara	Pancasila	Undang- Undang Dasar 1945	Perilaku Warga Negara
Manusia sebagai Pribadi				
Kekayaan Alam dan Budaya Indonesia				
Jati Diri Sebagai Bangsa Indoneisa				

Tabel 2.2 Landasan Konseptual Ontologis Pkn

Sumber: *Wahab&Sapriya (2011:321)*

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa objek kajian PKn tidak hanya dipahami sebagai kajian mengenai warga negara belaka saja, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan nilai, norma, bangsa, negara, serta realitas sosial-kultural yang melingkupinya. Luasnya objek kajian ini menunjukkan bahwa PKn memiliki posisi penting dalam membentuk kesadaran kebangsaan, karakter kewargaan, dan tanggung jawab sosial peserta didik, sehingga pembelajarannya perlu diarahkan tidak hanya pada penguasaan konsep, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku warga negara yang cerdas, dan kritis.

6. KEBIJAKAN PUBLIK

6.1 Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah **kebijakan publik** merupakan gabungan dari kata *kebijakan* dan *publik*. Nugroho (2008, hlm. 206) menjelaskan bahwa kebijakan (*policy*) merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pihak yang memiliki kewenangan, baik secara formal maupun informal. Sementara itu, istilah publik tidak hanya merujuk pada masyarakat secara umum, melainkan pada sekelompok individu yang memiliki keterkaitan dengan isu atau kepentingan tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, publik juga dipahami sebagai ruang interaksi warga negara, tempat berlangsungnya hubungan antara masyarakat dan negara dalam kehidupan sosial dan politik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan publik diartikan sebagai keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan pengertian tersebut, kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan politik yang telah dilembagakan dan digunakan sebagai instrumen strategis negara dalam mewujudkan tujuan nasional. Selain itu, kebijakan publik berfungsi sebagai sarana untuk mengarahkan masyarakat dalam menghadapi berbagai tahapan perkembangan, mulai dari kondisi awal, masa transisi, hingga tercapainya kondisi masyarakat yang diharapkan sesuai dengan cita-cita bangsa.

Sejalan dengan itu, Nugroho (2008) juga menyebutkan bahwa hadirnya kebijakan publik ialah untuk menciptakan keputusan atas pilihan-pilihan masa depan, singkatnya, kebijakan publik adalah menciptakan masa depan pada hari ini. William Jenkins dalam Nugroho (2008, hlm.204) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah:

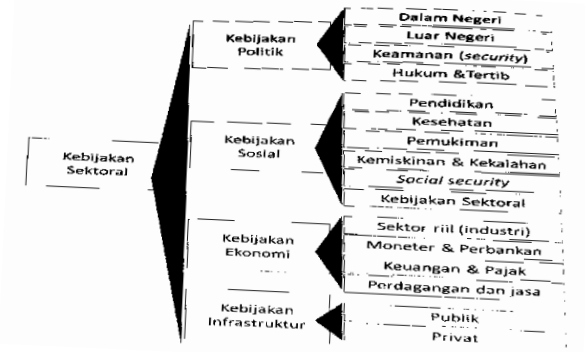
According to Jenkins (1978), public policy can be understood as a series of interconnected decisions made by political actors or groups of actors regarding the determination of objectives and the strategies required to accomplish them within a particular context. These decisions are expected to be within the authority and capacity of the actors responsible for implementing them. Furthermore, public policy reflects purposeful

government action, as it establishes specific goals and provides the mechanisms through which those goals can be achieved.

Dengan beberapa pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun fakta teknis. Maka, terdapat tendensi bahwa kebijakan publik ini tidak hanya bersifat positif, tetapi juga bisa bersifat negatif. Salah satu contoh dapat dilihat pada krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Pada awalnya, Indonesia menghadapi krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, krisis politik, hingga krisis multidimensional. Kondisi tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh praktik korupsi yang meluas atau berkembangnya kelompok konglomerat tertentu, melainkan juga berkaitan dengan kebijakan publik yang pada saat itu memberikan peluang terjadinya praktik-praktik tersebut. Kebijakan yang kurang efektif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan serta lemahnya pengendalian terhadap hubungan antara kekuasaan dan kepentingan ekonomi telah menciptakan ruang bagi terjadinya kolusi. Akibatnya, sejumlah pelaku usaha dapat memperoleh berbagai bentuk perizinan, fasilitas, maupun hak monopoli melalui kedekatan dengan pemegang kekuasaan.

6.2 Jenis Kebijakan Publik

Tergantung pada kriteria klasifikasinya, kebijakan publik terdiri dari berbagai jenis. Namun secara taksonomik, kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi kebijakan menurut sektor yang diatur, atau kebijakan sektoral, dan kebijakan menurut area yang diatur atau kebijakan kewilayahan. Menurut Nugroho (2008:107-110), kebijakan publik secara sektoral adalah kebijakan yang dibuat sesuai dengan bidang yang diatur oleh kebijakan tersebut, dan terdapat empat sektor utama, di antaranya: (1) sektor politik; (2) sektor sosial; (3) sektor ekonomi; (4) sektor infrastruktur.



Gambar 2.3 Persebaran kebijakan Sektoral

Sumber: (Nugroho:2008, hlm.116)

Menurut Nugroho (2008), Sektor pertama adalah sektor politik yang memiliki empat jenis sub kebijakan, yaitu:

- 1). **Kebijakan Dalam Negeri** yaitu kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik di dalam negara. Ruang lingkupnya meliputi penguatan sistem demokrasi, pelaksanaan pemilihan umum, hingga penerapan prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan kebijakan ini umumnya berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri beserta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
- 2) **Pembangunan Politik Luar Negeri** yaitu kebijakan yang mengatur hubungan Indonesia dengan negara lain serta organisasi internasional. Kebijakan ini mencakup kerja sama politik antarnegara, diplomasi internasional, dan berbagai bentuk kerja sama regional maupun global yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri.
- 3). **Keamanan Nasional**, yaitu kebijakan yang berfokus pada upaya menjaga kedaulatan negara, melindungi wilayah nasional, dan mempertahankan keamanan dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pelaksanaan kebijakan ini berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pertahanan beserta institusi terkait.
- 4). **Kebijakan penegakan hukum dan ketertiban umum**, yaitu kebijakan yang bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kebijakan ini dijalankan oleh lembaga-lembaga penegak hukum dan institusi peradilan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Selanjutnya, yang kedua adalah kebijakan publik di sektor sosial. Kebijakan publik di sektor sosial merupakan serangkaian tindakan kolektif pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memenuhi hak-hak sosial warga negara. Sektor ini mencakup penanggulangan kemiskinan, rehabilitasi sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat tertinggal (Putri & Mako, 2026).

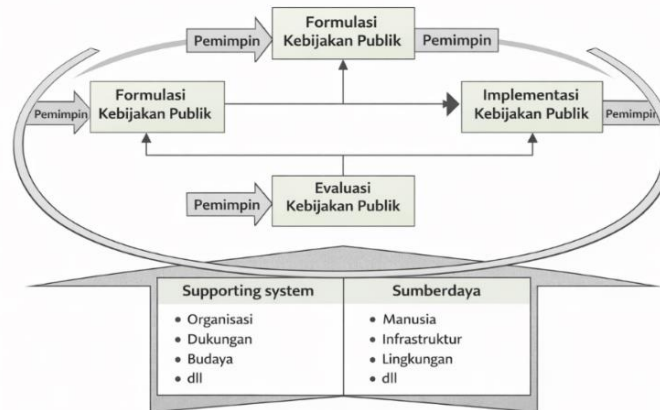
Sektor ketiga menurut Nugroho (2008, hlm.110-111) adalah kebijakan ekonomi yang dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu (1) kebijakan industri; (2) kebijakan moneter atau perbankan; (3) kebijakan keuangan atau perpajakan; (4) kebijakan perdagangan dan jasa. Sektor ketiga dalam kebijakan publik menunjukkan peran pemerintah dalam mengelola perekonomian melalui berbagai instrumen ekonomi. Pembagian ke dalam kebijakan industri, moneter, keuangan, serta perdagangan menegaskan bahwa negara memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sektor keempat dalam kebijakan publik adalah sektor infrastruktur. Dalam perspektif ekonomi, infrastruktur dipandang sebagai bentuk *public capital* atau modal publik yang dihasilkan melalui investasi pemerintah. Infrastruktur tersebut mencakup berbagai sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas masyarakat, seperti jalan raya, jembatan, serta sistem drainase dan pembuangan air (Mankiw, 2001, hlm. 38). Keberadaan infrastruktur memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

6.3 Peran Pemimpin Dalam Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2008, hlm.288-290), kepemimpinan atau *leadership* adalah isu abadi manusia dan kemanusiaan. Louis Allen mengemukakan, *The greatest question of our times is how to reconcile and integrate human effort so ple upon on the capabilities of leaders in all positions in all segments of society everywhere can work good and not cause their common disaster*. Pernyataan tersebut menekankan bahwa tantangan terbesar di era modern adalah bagaimana menyatukan berbagai kepentingan dan upaya manusia agar dapat berjalan selaras. Tanpa adanya integrasi dan koordinasi

yang baik, perbedaan kepentingan justru berpotensi menimbulkan konflik dan dampak negatif secara luas. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang mampu membangun kolaborasi demi mencapai kebaikan bersama.



Gambar 2.4 Formulasi Peran Pemimpin

Sumber: Nugroho (2008, hlm.294)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dipahami bahwa pemimpin memiliki posisi yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Peran pemimpin tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan, tetapi juga memastikan bahwa proses perumusan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga kondisi nyata (*das sein*) dapat mendekati kondisi ideal yang diharapkan (*das sollen*). Selain itu, pemimpin juga memiliki tanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan serta evaluasi kebijakan agar dapat berlangsung secara efektif dan mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam konteks organisasi dan sistem pemerintahan, pemimpin menjadi figur sentral yang berperan dalam menjamin keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, pemilihan seorang pemimpin tidak hanya didasarkan pada popularitas semata, melainkan juga pada kapasitas, kompetensi, integritas, serta karakter yang dimilikinya. Berbagai kualitas tersebut diperlukan agar pemimpin mampu menjalankan fungsi kepemimpinan secara optimal dan memberikan arah yang jelas dalam penyelenggaraan kebijakan publik.

7. ERA *SOCIETY* 5.0

7.1 Pengertian Era *Society* 5.0

Menurut Djatmiko (2023, hlm. 76), *Society* 5.0 adalah sebuah konsep yang diusung oleh pemerintah Jepang sebagai orientasi masa depan yang mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan kehidupan masyarakat sehari-hari dengan tujuan bisa menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Sehingga bisa disimpulkan bahwa *Society* 5.0 adalah manusia yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi Industri 4.0 dan berpusat pada teknologi.

Konsep *Society* 5.0 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing di era digital. Menurut Ruskandi et al. (2021, hlm. 1–2), *Society* 5.0 juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan, di antaranya (1) *Society* 5.0 mendorong pengembangan dan penerapan teknologi canggih yang dapat memberikan solusi inovatif; (2) integrasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas; (3) memungkinkan bisnis untuk terhubung dengan pasar global bahkan internasional. Sedangkan dalam kekurangannya, di antaranya (1) risiko keamanan dan pelanggaran data, (2) ketergantungan pada teknologi, (3) tantangan pengaturan etika dalam penggunaan teknologi.¹

7.2 Transformasi *Society* 5.0

Djarmiko (2023, hlm.84) mendefinisikan transformasi *Society* 5.0 sebagai proses evolusi masyarakat yang bertujuan untuk mengintegrasikan TIK pada kehidupan manusia dan melibatkan perubahan dalam beberapa aspek kehidupannya seperti aspek ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan lingkungan. Menurutnya, terdapat beberapa tahap dan elemen utama dari transformasi *Society* 5.0 diantaranya:

1) Teknologi Disruptif

Disrupsi teknologi merupakan suatu fenomena yang ditandai oleh perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat akibat pesatnya perkembangan teknologi digital. Fenomena ini mengubah pola pikir, kebiasaan, serta cara masyarakat menjalankan aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara

konvensional menjadi berbasis teknologi. Menurut Batubara (2017), disrupsi teknologi dapat dipahami sebagai perubahan mendasar yang terjadi sebagai konsekuensi dari kemajuan sistem teknologi digital, di mana berbagai fungsi dan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia mulai dialihkan atau digantikan oleh teknologi digital maupun sistem otomatisasi.

2) **Ekonomi Digital dan Inovasi**

Transformasi ini mendorong perkembangan ekonomi digital dan inovasi. *Start-up* dan perusahaan berbasis teknologi berperan dalam menciptakan solusi baru, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi (Djarmiko, 2023)

3) **Keterampilan dan Pendidikan**

Transformasi *Society 5.0* memerlukan keterampilan baru dalam memanfaatkan teknologi. Pendidikan dan pelatihan berfokus pada literasi digital, keterampilan teknologi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan (Djarmiko, 2023)

Transformasi *Society 5.0* tidak hanya menekankan pada teknologi, tetapi juga pada perubahan pola pikir masyarakat untuk menciptakan dampak positif melalui integrasi nilai kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini merupakan strategi Jepang yang relevan secara global karena tantangan seperti penuaan penduduk dan penurunan angka kelahiran juga dihadapi negara lain. Jepang menjadi pelopor dalam mengatasinya melalui penerapan *Society 5.0* dan berbagi solusi ke dunia. Namun, transformasi digital juga membawa risiko seperti masalah keamanan dan privasi yang perlu diwaspadai (Djarmiko:2023, hlm.78).

B. PENELITIAN TERDAHULU

Adapun di bawah ini penelitian terdahulu yang membahas terkait penggunaan metode debat dalam pembelajaran pendidikan pancasila:

1. Agetania, Widiastini, Marlinda, dan Wulandari (2025) dalam penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Metode Debat terhadap Partisipasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)* menemukan bahwa tingkat partisipasi

mahasiswa pada tahap observasi awal masih tergolong rendah. Penelitian tersebut menggunakan desain *pre-experimental* dengan model *one-group pretest-posttest* untuk menguji pengaruh metode debat terhadap partisipasi belajar mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata dari 60,70 pada tahap *pretest* menjadi 71,38 pada tahap *posttest*. Analisis data yang dilakukan menggunakan aplikasi SPSS menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan metode debat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Girsang, Trianton, dan Syahfitri (2024) melalui penelitian berjudul *Pengaruh Metode Debat terhadap Kemampuan Menyusun Argumentasi pada Siswa SMK Negeri 1 Pamatang Silimahuta* mengkaji efektivitas metode debat dalam meningkatkan kemampuan argumentasi siswa. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen yang memperoleh pembelajaran menggunakan metode debat dan kelompok kontrol yang menggunakan metode konvensional. Berdasarkan hasil *posttest*, kelompok eksperimen memperoleh nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Temuan tersebut menunjukkan bahwa metode debat efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam menyusun argumentasi sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
3. Sari, Nuryadi, dan Hartanto (2025). *Penerapan Metode Pembelajaran Debat Untuk Pembentukan Karakter Pancasila Pada Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 1 Kradenan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode debat dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mampu membentuk karakter Pancasila peserta didik melalui nilai (1) spiritual; (2) kemandirian; (3) kolaborasi; serta (4) nasionalisme. Proses debat yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan refleksi terbukti meningkatkan kemampuan berpikir kritis, sikap toleransi, serta partisipasi aktif siswa. Selain itu, metode debat juga berpengaruh dalam menumbuhkan nilai disiplin, kepemimpinan, dan gotong

royong, sehingga peserta didik menjadi lebih mampu berpikir logis, mengendalikan emosi, serta menghargai perbedaan.

4. Hidayatullah (2021). *Analisis Strategi Debat Aktif Untuk Mendukung Kemampuan Komunikasi Peserta Didik*. Peneliti mengolah data melalui penelitian literatur kepustakaan dan studi dokumenter, hasilnya menyatakan bahwa strategi debat aktif dapat mendukung kemampuan dasar komunikasi peserta didik yaitu komunikasi lisan, mendengarkan, mediasi dan *body language*. Menurutnya, strategi debat aktif juga perlu diperhatikan dalam mengatur posisi duduk peserta didik, membuat sub kelompok yang terbagi menjadi kelompok pro dan kontra, serta peran guru yang mendukung berjalannya proses debat aktif dalam pembelajaran.
5. Sufaat (2025) dalam penelitiannya yang berjudul *Penerapan Metode Pembelajaran Debat Aktif untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa MTs Negeri 2 Lampung Timur* mengungkapkan bahwa rendahnya hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap materi pembelajaran, rendahnya tingkat konsentrasi, serta dominannya peran guru dalam proses pembelajaran yang menyebabkan siswa kurang aktif. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa dari 62,50% pada siklus I menjadi 84,38% pada siklus II. Selain itu, aktivitas belajar siswa dan kinerja guru selama proses pembelajaran juga mengalami peningkatan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode debat aktif efektif dalam meningkatkan hasil belajar sekaligus mendorong keaktifan siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran, menurut Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992), yang dikutip oleh Sugiyono (2016, hlm.91) ialah suatu model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi

sebagai permasalahan utama. Kemudian Sugiyono (2016, hlm. 92) mengatakan, *“Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Sehingga kerangka pemikiran berfungsi sebagai penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.”*

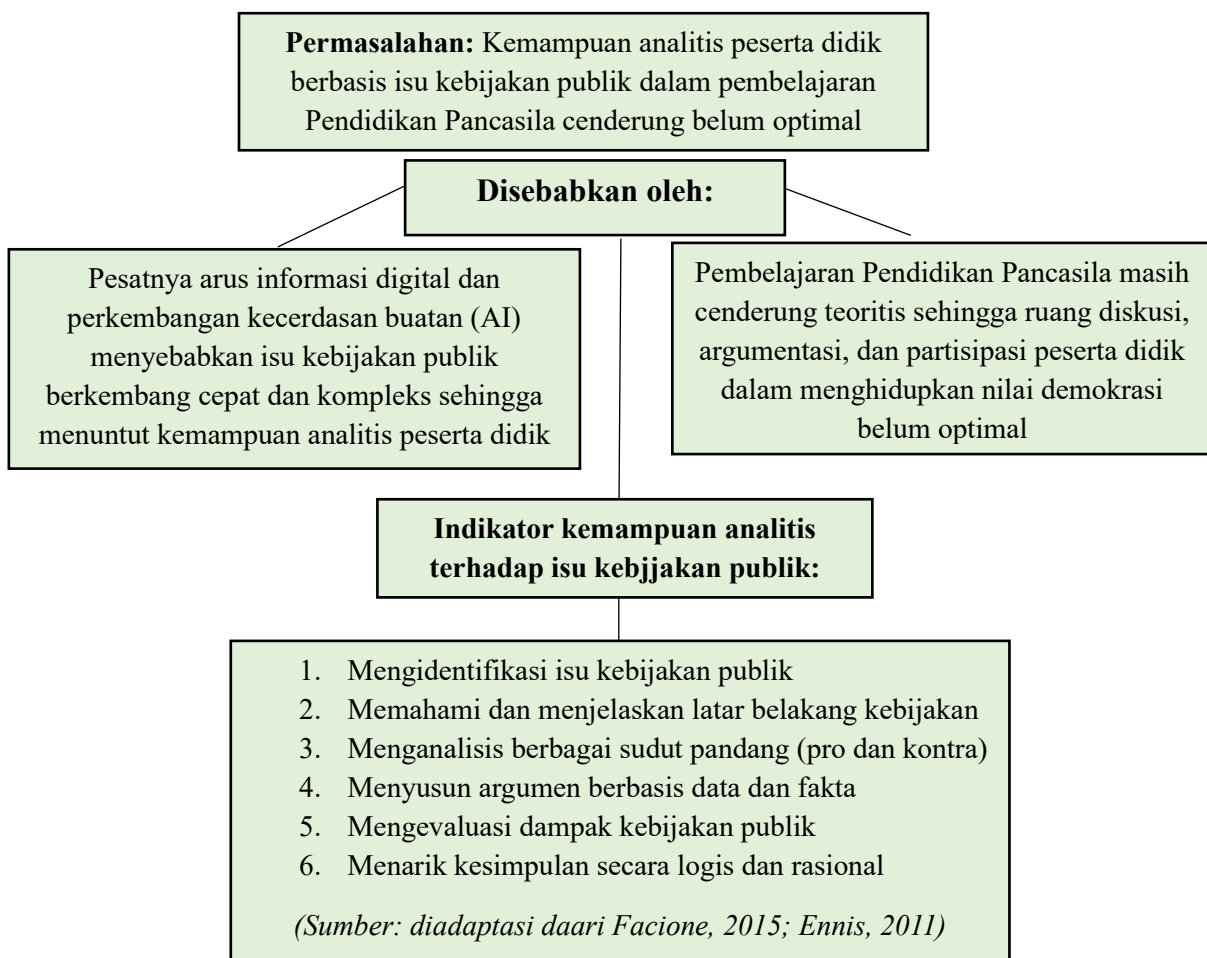
Fenomena literasi di sekolah, khususnya di Kota Bandung, menunjukkan adanya upaya dalam pembiasaan membaca yang dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar (KBM) sebagai upaya meningkatkan budaya literasi di ruang akademik. Namun demikian, dalam praktiknya, kegiatan literasi tersebut belum sepenuhnya diiringi kemampuan memahami dan memaknai isi bacaan secara mendalam. Hal tersebut penulis alami dan melihatnya secara langsung saat masa praktik mengajar dengan kurun waktu 2,5 bulan di sekolah tingkat menengah atas di Kota Bandung. Peserta didik cenderung hanya membaca secara permukaan tanpa melakukan proses analisis, evaluasi, maupun refleksi terhadap informasi yang diperoleh setelah membacanya.

Di era *Society 5.0*, kita disuguhkan dengan kehadiran teknologi seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) termasuk platform seperti *ChatGPT*, yang memberikan kemudahan dalam mengakses informasi secara instan. Meskipun teknologi ini dapat mendukung proses pembelajaran, informasi yang disajikan belum tentu sepenuhnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya kemampuan verifikasi dari pengguna. Oleh karena itu, hal tersebut berpotensi menyebabkan peserta didik menjadi pasif dalam berpikir dan kurang terlatih dalam menalar suatu informasi secara kritis. Di sisi lain Pendidikan Pancasila memiliki peran besar bagi peserta didik dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai pendapat, berpikir rasional, dan berpartisipasi aktif dalam diskusi.

Sehingga, diperlukan suatu metode pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan analitis sekaligus menanamkan nilai demokrasi, salah satunya melalui metode debat. Debat hadir memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkaji suatu isu atau mosi yang berkaitan dengan kebijakan publik yang merupakan bentuk nyata keputusan negara yang sangat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaanya, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Kota

Bandung adalah contoh sekolah yang telah menerapkan metode debat dalam pembelajaran PKn.

Dalam prosesnya, metode debat juga mengharuskan peserta didik untuk menyusun argumen secara logis berbasis data, meskipun tidak selalu sejalan dengan pandangan pribadinya. Selain itu, debat juga mendorong peserta didik tidak bergantung pada gawai, melainkan aktif dalam berpikir, menalar, serta menjadi wadah yang efektif dalam meningkatkan kemampuan analitis peserta didik dalam menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan pancasila.



Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran

sumber: diolah peneliti, 2026